

ANALISIS POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DAERAH

KOTA PURBALINGGA TAHUN 2018

“Studi Kasus Alun-alun Purbalingga”

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Bagus Pinantun Jati

Nomor Induk : 14313070

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2021

**ANALISIS POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DAERAH
KOTA PURBALINGGA TAHUN 2018
“Studi Kasus Alun-alun Purbalingga”**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Bagus Pinantun Jati

Nomor Mahasiswa : 14313070

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Oktober 2021

Penulis,



Bagus Pinantun Jati

PENGESAHAN

ANALISIS POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DAERAH KOTA

PURBALINGGA TAHUN 2018

“Studi Kasus Alun-alun Purbalingga”

Nama : Bagus Pinantun Jati
Nomor Mahasiswa : 14313070
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 11 Oktober 2021

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Sarastri Mumpuni Ruchba, Dra., M.Si.

PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diujikan dan disahkan untuk
memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana jenjang strata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Nama : Bagus Pinantun Jati
Nomor Mahasiswa : 14313070
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 11 Oktober 2021

Disahkan oleh,

Pembimbing Skripsi : Dra. Sarastri Mumpuni Ruchba, M.si
Penguji : Mohammad Bekti Hendrie Anto,,S.E., M.Sc.
Penguji : Sarastri Mumpuni Ruchba,Dra.,M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNYA sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Retribusi Parkir Daerah Kota Purbalingga Tahun 2018 study kasus Alun-alun Purbalingga”.

Skripsi ini dibuat dan diajukan guna memperoleh gelar Strata 1, pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Selain itu penulisan skripsi ini adalah bertujuan untuk menambah pengetahuan kepada pembaca mengenai retribusi parkir daerah khususnya untuk kota Purbalingga.

Selama penulisan skripsi ini penulis memperoleh banyak dukungan, motivasi dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D. Selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Dra. Sarastri Mumpuni Ruchba, M.Si. Selaku dosen pembimbing yang begitu sabar dan tidak ada henti-hentinya untuk mengingatkan saya tentang skripsi dan membantu memberikan masukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Terkasih keluarga penulis, bapak dan ibu selalu memberikan dukungan moral dan terus memberikan semangat agar menyelesaikan penulisan

skripsi ini. Tanpa nasihat dan semangat dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.

4. Paguyuban Petugas Parkir Purbalingga (PPPP) yang telah bersedia memberikan data dan bersedia untuk diwawancarai.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga yang juga membantu memberikan data dan fasilitas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini,
6. Jadid Fuadi yang telah membantu menyusun skripsi ini dan menemani penulis mendapatkan data dari berbagai pihak dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang didapat penulis, Oleh karenanya, semua bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat membantu, memberikan pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Purbalingga, 11 Oktober 2021



Bagus Pinantun Jati

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Kata Pengantar	v
Halaman Daftar Isi	vii
Halaman Daftar Tabel	ix
Halaman Daftar Gambar	x
Halaman Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Kajian Pustaka	9
2.2 Landasan Teori	13
2.3 Kerangka Penelitian	21
2.4 Hipotesis	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber data	25
3.2 Metode Analisis Data	26
3.3 Model Penelitian	30
3.4 Definisi Operasional	30

BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskripsi Data	33
4.2 Deskripsi Objek Penelitian	35
4.3 Hasil Penelitian	38
4.4 Analisis Ekonomi	42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	45
Daftar Pustaka	47



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tarif Parkir Kabupaten Purbalingga	3
1.2 Tarif Parkir Berdasarkan Tempat Wisata	4
1.3 Data Retribusi Daerah Purbalingga	6
4.1 Pendapatan Retribusi Parkir Pemerintah Purbalingga	36
4.2 Pendapatan Retribusi Parkir Berdasarkan Petugas Parkir	37
4.3 Biaya Pemungutan Retribusi Parkir	37
4.4 Statistik Deskriptif	39
4.5 Independent Sample t-Test	39
4.6 Rasio Efektivitas	41
4.7 Rasio Efisiensi	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Peta Alun-alun Purbalingga	6
2.1 Perbandingan Pendapatan	22
4.1 Gambaran Umum Peta Alun-alun Purbalingga	33



ABSTRAK

Pada kasus retribusi parkir di Kabupaten Purbalingga, pemerintah daerah memberikan kewenangan atas pendapatan retribusi parkir kepada pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi, efektivitas dan efisiensi retribusi parkir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji beda 2 variabel untuk mengetahui pendapatan retribusi parkir yang diterima oleh pemerintah dan pendapatan retribusi parkir yang didapat langsung dari petugas parkir, teori efektivitas dan efisiensi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari petugas parkir dan data yang disajikan oleh pemerintah melalui dinas perhubungan Kabupaten Purbalingga. Kesimpulannya, rata-rata pendapatan retribusi parkir yang diterima oleh pemerintah dan petugas parkir terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan efektivitas dan efisiensi dari pemungutan retribusi parkir yang dilakukan pemerintah daerah dinilai sudah efisien dan efektif.

Kata Kunci : retribusi parkir, efektivitas, potensi, efisiensi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Otonomi Daerah sudah semestinya namun pelaksanaanya mengacu pada undang-undang nomor 5 tahun 1974 yang berujung dengan asas sentralisasi kemudian pada masa setelah orde baru undang-undang nomor 5 tahun 1974 digantikan oleh undang-undang nomor 22 tahun 1999 di mana pada undang-undang nomor 22 tahun 1999 lebih menekankan arti penting kewenangan suatu daerah akan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah itu sendiri memiliki arti yaitu hak dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri berbagai urusan pemerintah dan juga kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.¹

Retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang diambil sebagai pembayaran atas jasa terhadap adanya aktivitas pengeluaran dan pemberian perizinan tertentu oleh pemerintah daerah yang diberikan secara khusus untuk pihak tertentu baik pribadi maupun badan usaha, yang diharapkan mampu menyokong pendapatan daerah yang merupakan salah satu aspek dalam pendapatan asli daerah di mana pendapatan asli daerah itu merupakan salah satu sumber dana untuk melakukan pembangunan di masing-masing daerah. Pendapatan daerah terdiri dari beberapa aspek yaitu pendapatan asli

¹ *Undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 1999*

daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Retribusi daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pendapatan asli daerah yang merupakan satu sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang menjadi faktor utama dan tolak ukur kemiskinan daerah. Retribusi daerah meliputi di antaranya yaitu retribusi parkir yang termasuk dalam penerimaan retribusi jasa umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Pengertian menurut KBBI tersebut dapat diartikan sesuai dengan pasal 1694 KUH perdata, bahwa penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.

Retribusi daerah yang meliputi di antaranya yaitu retribusi parkir yang dilihat dari sisi pendapatannya kurang atau terlalu kecil dibandingkan dengan komponen pendapatan asli daerah lainnya akan tetapi disisi lain para pengguna jasa layanan parkir sering mengeluh lantaran biaya parkir yang cenderung mahal dan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Seiring dengan penentuan tarif parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah Purbalingga menetapkan tarif parkir menurut peraturan daerah nomor **04 tahun 2012 pasal 22** sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tarif Parkir Kabupaten Purbalingga

No.	Jenis kendaraan	Tarif untuk sekali parkir
1	Sepeda Motor	Rp. 1.000
2	Jeep, Sedan, Minibus, Pick-up dan sejenisnya	Rp. 2.000
3	Truk dan Bus Roda empat	Rp. 2.000
4	Bus, Truk dan kendaraan besar lainnya	Rp. 5.000
5	Truk gandengan, trailer dan sejenisnya	Rp. 7.500

Sumber: peraturan daerah purbalingga nomor 05 tahun 2012

Sedangkan Tabel 1.2 memperlihatkan tarif pada lahan parkir tempat wisata

Tabel 1.2 Tarif Parkir Berdasarkan Tempat Wisata di Purbalingga

No	Jenis Kendaraan	Tarif untuk sekali parkir	
1.	Monumen Jendral Soedirman		
	Hari biasa		
	a. Roda 2 (dua)	Rp. 1.000	
	b. Roda 4 (empat)	Rp. 2.000	
	c. Roda 6 (enam)	Rp. 3.000	
	Hari Libur		
	a. Roda 2 (dua)	Rp. 1.500	
	b. Roda 4 (empat)	Rp. 3.000	
	c. Roda 6 (enam)	Rp. 4.000	
	2.	Kawasan Wisata Goa Lawa	
		Hari Biasa	
		a. Roda 2 (dua)	Rp. 1.000
b. Roda 4 (empat)		Rp. 3.000	
	c. Roda 6 (enam)	Rp. 4.000	
	Hari Libur		
	a. Roda 2 (dua)	Rp. 1.500	
	b. Roda 4 (empat)	Rp. 3.500	
	c. Roda 6 (enam)	Rp. 5.000	
	Hari Raya		
	a. Roda 2 (dua)	Rp. 2.000	
	b. Roda 4 (empat)	Rp. 4.000	
	c. Roda 6 (enam)	Rp. 6.000	
	3.	Bumi Perkemahan Munjuluhur	
		Hari Biasa	
		a. Roda 2 (dua)	Rp. 1.000
b. Roda 4 (empat)		Rp. 2.000	
	c. Roda 6 (enam)	Rp. 3.000	
	Hari Libur		
	a. Roda 2 (dua)	Rp. 1.500	

No	Jenis Kendaraan	Tarif untuk sekali parkir
	b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	Rp. 3.000 Rp. 4.000
4.	Gor Goentoer Darjono a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	Rp. 1.000 Rp. 2.000 Rp. 3.000
5.	Mahesa Jenar a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	Rp. 1.000 Rp. 2.000 Rp. 3.000

Sumber: Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 05 tahun 2012

Tata cara pemungutan tarif parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2012 pasal 28 dan 29 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran retribusi. Setiap pengguna lahan parkir yang dikenakan biaya retribusi parkir harus mendapatkan karcis parkir yang diberikan oleh juru parkir sebagai tanda bukti pembayaran retribusi parkir dan untuk disetorkan secara bruto kepada kas daerah paling lambat 1 hari.

Tarif parkir dikenal dengan istilah retribusi parkir yang termasuk jenis retribusi jasa umum sebagaimana yang tertuang dalam **Pasal 110 ayat (1) huruf e UU 28/2009**, yaitu tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Menurut **Pasal 109 UU 28/2009**, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum,

gedung, pelataran atau bangunan umum. Tabel 1.3 memperlihatkan perolehan secara keseluruhan retribusi daerah Purbalingga dari tahun 2010 hingga 2017.

Tabel 1.3 Data Retribusi Daerah Purbalingga

No	Retribusi Daerah	Pendapatan (Rp)
1	2010	55.759.037
2	2011	62.832.892
3	2012	27.435.984
4	2013	29.293.478
5	2014	33.296.583
6	2015	24.347.708
7	2016	31.579.088
8	2017	41.155.890

(sumber: badan pusat statistik purbalingga)

Data pada Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendapatan retribusi daerah yang sangat fluktuatif, dilihat dari tahun 2012 yang menurun cukup drastis.

Letak alun-alun Purbalingga di jalan Jendral Soedirman, Purbalingga Lor, kecamatan Purbalingga, kabupaten Purbalingga. Alun-alun purbalingga merupakan salah satu tempat rekreasi yang ramai dikunjungi oleh warga Purbalingga bahkan wisatawan yang datang ke daerah Purbalingga, di alun-alun Purbalingga sendiri banyak penjual kaki lima yang menjajakan jualannya kepada wisatawan yang hadir. Bentuk alun-alun Purbalingga saat ini yaitu bundar dengan menghadap ke arah pendopo Purbalingga. Akses menuju alun-alun Purbalingga sendiri terbilang cukup mudah, seperti yang digambarkan peta di bawah ini :

Gambar 1.1 Peta Alun-Alun Purbalingga



(sumber: google maps)

Alun-alun Purbalingga memiliki lahan parkir yang cukup luas, hampir seluruh tepian alun-alun dijadikan lahan parkir oleh pemerintah daerah Purbalingga, dan lahan parkir ini yang akan di lelang oleh pemerintah daerah Purbalingga.

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PARKIR DAERAH KOTA PURBALINGGA TAHUN 2018 studi Kasus Alun-alun Kota Purbalingga. Sudah selayaknya retribusi parkir ditangani secara profesional sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah potensi retribusi parkir daerah kota purbalingga khususnya daerah alun-alun purbalingga sudah terserap secara maksimal?
2. Apakah pengelolaan retribusi parkir daerah Alun-alun Purbalingga sudah dinilai efektif?
3. Apakah pengelolaan retribusi parkir daerah Alun-alun Purbalingga sudah dinilai efisien?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis potensi pendapatan retribusi parkir daerah Alun-alun Purbalingga.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan retribusi parkir di daerah Alun-alun Purbalingga.
- 3) Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan retribusi parkir di daerah Alun-alun Purbalingga.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut, terkait dengan retribusi parkir yang selama ini menurut peneliti kurang diperhatikan.

2) Bagi Peneliti

Bagi peneliti penelitian ini akan menambah ilmu dan wawasan terkait dengan judul dan dapat menerapkan analisis yang sudah dipelajari selama di bangku pendidikan.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang dapat digunakan oleh para akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini memuat berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain ataupun ahli dan permasalahan yang diangkat sebanding dengan peneliti lain baik itu dalam bentuk skripsi maupun jurnal.

Ardi Pradana, Anastasia Yulianti dan Djoko Setijowarno (2014, jurnal Potensi Pendapatan Parkir di Kota Salatiga), penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang bersumber dari wawancara, kondisi lapangan dan data volume lalu lintas. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Variabel bebas yang termasuk dalam penelitian ini adalah jam kerja, jumlah petugas, luas, jumlah kendaraan parkir, IP, turn over, penyediaan parkir dengan variabel terikatnya yaitu potensi parkir. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu :

1. Kinerja jalan di Kota Salatiga di 47 titik parkir masih baik.
2. Pada umumnya kinerja parkir di 46 titik parkir masih baik. Satu titik parkir yang mendekati jenuh adalah Cosmo (IP = 0,92).
3. Nilai *turn over* paling tinggi di Timlo (1,42).
4. Untuk kebutuhan parkir saat ini, penyediaan ruang parkir di 47 titik parkir masih memenuhi.
5. Estimasi pendapatan parkir harian kotor di 47 titik parkir pada tahun 2014 sama dengan Rp. 6.245.000,00.
6. Faktor yang paling besar berpengaruh terhadap peningkatan potensi parkir

adalah indeks parkir (IP). Artinya kinerja parkir perlu diperhatikan apabila ingin meningkatkan potensi parkir.

Rahmawati Widya Putri (2015, skripsi Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah), peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang bersumber dari wawancara dan data realisasi PAD kabupaten malang tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif dan instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan yaitu berupa statistik model sederhana dengan menghitung realisasi penerimaan pendapatan parkir dibagi realisasi penerimaan PAD lalu dikalikan 100%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Kontribusi pendapatan parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten malang mengalami fluktuasi.
2. Tingkat efektivitas pendapatan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten malang tergolong efektif.

Stephanny Inagama Timisela, Meinarni Asnawi, Yundi Hafizrianda (2017, jurnal Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura), data yang diambil adalah data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari tempat objek penelitian atau sumber pertama. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kuantitatif digunakan dalam menganalisis penerimaan daerah kota Jayapura yang bersumber dari retribusi parkir tepi jalan umum kota Jayapura dalam bentuk *time series*. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan

dalam menganalisis sifatnya deskriptif analitik dan tidak dituangkan dalam bentuk angka. Hasilnya adalah pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum sangat kurang terkait optimalisasi penerimaan objek retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Jayapura. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura, belum dilaksanakan secara efektif dalam rangka optimalisasi potensi Penerimaan Asli Daerah. Hal ini antara lain dapat ditemukan adanya kebocoran sekitar 59% per tahun.
2. Dalam mengantisipasi persoalan kebocoran realisasi dan optimalisasi potensi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura, hal ini dapat dilakukan melalui strategi peningkatan maupun penataan Aspek Regulasi, Sumber Daya Manusia, Kesadaran Masyarakat, Kelembagaan, dan Sistem dan Prosedur.

P. Heru Prasetyo (2008, skripsi Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah), penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara pihak berwenang dan metode dokumentasi dengan mempelajari buku-buku catatan dan arsip pemerintah pada masa lalu yang berkaitan dengan masalah yang sedang ditelaah. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dan variabel bebasnya yaitu efisiensi penerimaan retribusi parkir, kontribusi retribusi parkir dan efektivitas penerimaan retribusi parkir. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu,

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di kota Yogyakarta dari tahun 2004-2005 adalah positif.
2. Efektivitas penerimaan retribusi parkir kota Yogyakarta pada tahun 2003, 2004 dan 2006 tidak efektif, sedangkan pada tahun 2005 efektif.
3. Efisiensi penerimaan retribusi parkir kota Yogyakarta pada tahun 2003-2006 efisien.

Haruni Ode, Irwan Moridu (2017, Jurnal Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai), penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari SKPD kabupaten Banggai dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian, jurnal penelitian terdahulu dan artikel-artikel yang terkait dengan objek penelitian. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu, pendapatan asli daerah dan variabel bebas pada penelitian ini yaitu, retribusi daerah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah variabel retribusi daerah mampu menjelaskan 0,979 persen sedangkan sisanya yaitu 2,1 persen dijelaskan oleh variabel lainnya. Tingkat efektivitas retribusi daerah menghasilkan persentase mendekati 100% yang artinya retribusi daerah kabupaten Banggai semakin baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Dalam perekonomian Kabupaten Banggai selama periode 2011 sampai 2015 variabel retribusi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Banggai. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < \text{ taraf nyata } 0,05$.
2. Efektivitas retribusi Kabupaten Banggai tahun 2011 sampai 2015, rata-rata 86,708 persen, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Banggai cukup efektif.
3. Kontribusi daerah Kabupaten Banggai terhadap PAD pada periode tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2015 nilainya masih rendah dan mendekati 50 persen.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu, penelitian ini ingin memberikan keterangan tentang kondisi retribusi parkir daerah Alun-alun Purbalingga apakah sudah terserap maksimal, efektif dan efisien oleh pemerintah daerah ataupun belum.

2.2 Landasan teori

2.2.1 Otonomi daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengelola, mengurus dan mengatur sendiri terkait dengan kepentingan masyarakat daerahnya masing-masing sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di masing-masing daerah (uu no. 32 tahun 2004). Dengan diberlakukannya aturan otonomi daerah ini, maka diharapkan pemerintah daerah mampu mengatasi masalah-masalah daerah dan mampu mengembangkan potensi daerahnya masing-masing guna menunjang pendapatan asli daerah.

2.2.2 Penerimaan daerah

1. Pengertian penerimaan daerah

Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004 penerimaan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai kekayaan bersih daerah dalam periode anggaran tertentu.

2. Sumber Penerimaan daerah

Penerimaan daerah merupakan aspek penting bagi pemerintah karena untuk mendanai segala pembangunan daerahnya masing-masing. Penerimaan daerah secara keseluruhan dikelola oleh daerah sehingga daerah mempunyai kewenangan khusus dalam mengelola sumber pendapatan daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Beberapa sumber-sumber pendapatan daerah yaitu (suparmoko,2000) :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Penerimaan lain-lain yang sah

A. Pendapatan asli daerah

Merupakan pendapatan atau penerimaan yang yang dapat diusahakan atau dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Unsur-unsur pendapatan asli daerah meliputi: penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, PAD lain-lain yang sah. Dari keempat unsur pendapatan asli daerah tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan unsur yang paling memengaruhi bagi

sumber pendapatan asli daerah. Dasar hukum yang mengatur tentang pendapatan asli daerah diatur dalam uu nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak dan retribusi daerah yaitu:

1. Pajak daerah :

1. Pajak hotel dan restoran
2. Pajak hiburan
3. Pajak reklame
4. Pajak penerangan jalan
5. Pajak pemanfaatan air

2. Retribusi daerah :

Retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang diambil sebagai pembayaran atas jasa terhadap adanya aktivitas pengeluaran dan pemberian perizinan tertentu oleh pemerintah daerah yang diberikan secara khusus untuk pihak tertentu baik pribadi maupun badan usaha.

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001;14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Menurut Juli Panglima Saragih (2002;65) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Nick Devas (1989;95) memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah.

Retribusi berkaitan dengan adanya pelayanan berupa jasa-jasa tertentu yang bersinggungan dengan aspek sosial dan ekonomi. Karena berkaitan dengan sosial dan ekonomi, maka diperlukan campur tangan pemerintah daerah guna memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Jenis-jenis retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah tujuannya untuk kepentingan dan memiliki manfaat secara umum yang digunakan oleh pribadi maupun badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu:

- a. Retribusi jasa pelayanan kesehatan
- b. Retribusi jasa kebersihan
- c. Retribusi jasa penggantian biaya cetak KTP ataupun akte
- d. Retribusi pelayanan pemakaman
- e. Retribusi jasa layanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar

g. Retribusi pelayanan pendidikan

2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan komersial yang sifatnya belum dimanfaatkan secara optimal, meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha yaitu:

- a. Retribusi terminal
- b. Retribusi parkir khusus
- c. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- d. Retribusi rumah potong hewan
- e. Retribusi pengolahan limbah cair
- f. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- g. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- h. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah di dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi maupun badan yang dimaksudkan untuk dapat pembinaan, pengaturan, pengendalian dan juga

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, barang, ataupun fasilitas tertentu yang guna melindungi kepentingan umum dan juga menjaga kelestarian lingkungan.

B. Dana perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. (https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Perimbangan)

C. Pinjaman daerah

Pinjaman daerah adalah alternatif sumber pendanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan solusi untuk menutup kekurangan kas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan untuk kepentingan daerah seperti kegiatan-kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah, kegiatan-kegiatan untuk kepentingan layanan masyarakat, dan lain sebagainya dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan

D. Penerimaan lain-lain yang sah

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. (<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2017/02/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan-asli-daerah-pad.html>)

2.2.3 Potensi

Secara umum potensi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Sedangkan secara ekonomi dapat diartikan sebagai peluang dalam segala bentuk dengan segala hal kemungkinan yang telah kita usahakan dalam bentuk modal, baik modal material maupun non material.

Beberapa contoh potensi yang dapat dikembangkan daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerahnya yaitu :

1. Potensi ekonomi sumber daya alam.
2. Potensi ekonomi pariwisata.
3. Potensi ekonomi dalam hal pajak dan retribusi daerah.

2.2.4 Efektivitas

Kata efektif *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik tanpa memperhatikan efisiensi. Secara umum efektivitas berarti suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau tingkat kesuksesan suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan jangka waktu yang telah direncanakan. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang tercapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Untuk mengukur tingkat efektivitas digunakan rumus sebagai berikut (Insukindro dkk, 1994: 6):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Potensi Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Untuk mengukur nilai efektivitas, mengikuti standar yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri, maka dapat diketahui apabila koefisien efektivitasnya bernilai di bawah 0,40 (40 persen) berarti sangat tidak efektif, jika berada pada nilai antara 40% – 60% berarti tidak efektif dan jika berada pada nilai 60% – 80% berarti cukup efektif, sedangkan jika berada di antara nilai 80% – 100% dikatakan efektif (Tumimomor, 2002).

2.2.5 Efisiensi

Secara umum efisiensi bisa diartikan sebagai penggunaan waktu atau sumber daya dengan hemat/sedikit untuk mewujudkan suatu rencana kegiatan. Semakin sedikit waktu atau sumber daya yang digunakan maka semakin efisien kegiatan tersebut. Dalam ekonomi, efisiensi adalah studi bagaimana negara ataupun

bisnis bisa memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Efisiensi bisa diukur dengan cara menghitung *Cost of Collection Efficiency Ratio* (CCER), yang merupakan perbandingan antara biaya operasional yang dikeluarkan dengan total penerimaannya. Rumus *Cost of Collection Efficiency Ratio* (CCER) adalah sebagai berikut (Sidik, 1994: 65-67):

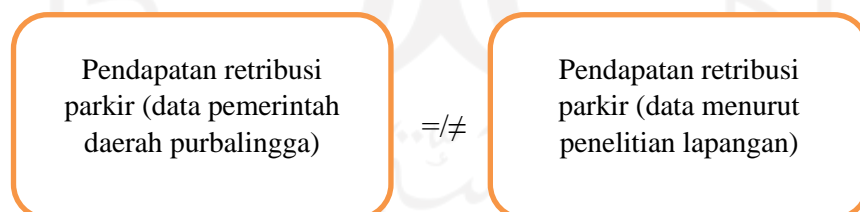
$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Potensi Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Semakin kecil rasionya, berarti biaya operasional yang dikeluarkan semakin kecil maka tingkat efisiensi semakin tinggi dalam pengelolaan pemungutannya.

2.3 Kerangka Penelitian

Model konseptual yang berdasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka penelitian digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Perbandingan pendapatan



Jika penelitian ini menunjukkan hasil seperti pada Gambar 2.1 maka kesimpulan sementara yang bisa diambil yaitu, pemerintah daerah Purbalingga telah maksimal dalam menyerap pendapatan retribusi parkir khususnya di daerah alun-alun Purbalingga.

Di negara berkembang, termasuk Indonesia tingkat kepemilikan kendaraan pribadi bisa dibilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan

negara maju, karena di negara berkembang tingkat pajak akan kepemilikan kendaraan pribadi tidak terlalu tinggi dan tingkat retribusi parkir yang cukup rendah. Misalnya di Indonesia, harga motor Rp. 15.000.000,00 jika dibandingkan dengan retribusi parkir yang hanya Rp. 1.000,00 yang perbandingannya 1:15000. Sangat jauh perbandingan antara harga motor dengan retribusi parkirnya.

Hubungan antara pendapatan retribusi parkir yang diterima oleh pemerintah daerah seharusnya seimbang atau sama dengan data lapangan dari pendapatan retribusi parkir daerah yang diperoleh oleh juru parkir. Disamping itu, pemerintah daerah seharusnya lebih mudah mengontrol atau menganalisa pendapatan retribusi parkir dari karcis parkir yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi potensi hilangnya pendapatan parkir yang diambil oleh pihak lain.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara akan masalah-masalah yang ada akan tetapi masih bersifat praduga atau kemungkinan karena masih harus dibuktikan akan kebenarannya dengan menggunakan data-data hasil penelitian. Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga ada perbedaan antara retribusi parkir riil (data paguyuban petugas parkir Purbalingga) dan dari dinas perhubungan Kabupaten Purbalingga pada daerah Alun-alun Purbalingga.
2. Diduga retribusi parkir daerah Alun-alun Purbalingga dinilai belum efisien.
3. Diduga retribusi parkir daerah Alun-alun Purbalingga dinilai belum efektif.

Analisis uji independent sample T-test adalah untuk menjelaskan perbandingan rata-rata dari dua grup dengan subjek yang sama akan tetapi mengalami 2 perlakuan yang berbeda (ridwan, 2009). Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian analisis potensi pendapatan retribusi parkir daerah kota purbalingga tahun 2018 studi kasus alun-alun purbalingga. Uji statistik dilakukan dengan melakukan pengujian uji independent samples t-test. Independent samples t-test digunakan untuk mengetahui mean atau rata-rata dari subjek yang berbeda dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara 2 kelompok. Uji hipotesis t sebagai berikut :

1. Jika hipotesis signifikan positif
 - a. $H_0 : \beta_i \leq 0$
 - b. $H_1 : \beta_i > 0$
2. Jika hipotesis signifikan negatif
 - a. $H_0 : \beta_i \geq 0$
 - b. $H_1 : \beta_i < 0$
3. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5%
4. Kriteria Pengujian :
 - a. Jika nilai pengujian prob. T-statistik > 0.05 maka, H_0 diterima artinya variabel bebas tidak memengaruhi variabel terikat secara signifikan

Jika nilai pengujian prob. T-statistik ≤ 0.05 maka, H_0 ditolak artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh pihak ketiga, seperti buku literatur, arsip-arsip pemerintahan dan juga data yang telah disediakan oleh pemerintah guna penelitian, sedangkan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari objek penelitiannya, dalam hal ini pendapatan juru parkir, pembagian lahan parkir dan tingkat pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan lahan parkir di daerah alun-alun Purbalingga yang peneliti cari. Data sekunder yang peneliti gunakan yaitu bersumber dari :

1. Dinas Perhubungan daerah kabupaten Purbalingga.
2. Kantor SKPD kabupaten Purbalingga.
3. Badan Pusat Statistik kabupaten Purbalingga.

Hasil data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber di atas yaitu :

1. Data tentang pendapatan retribusi parkir kecamatan Purbalingga.
2. Pendapatan Asli Daerah kabupaten Purbalingga.
3. Pendapatan retribusi daerah Purbalingga.
4. Data tenaga kerja kabupaten Purbalingga.

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Uji Beda 2 Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah ada perbedaan antara pendapatan retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga yang diperoleh oleh pemerintah dengan fakta lapangan yang ada. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode uji statistik perbedaan rata-rata dua sampel bebas (*independent sample t-test*). Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu data *cross section* merupakan data sampel dari 2 kelompok berbeda, yaitu data yang bersumber dari pemerintah daerah dengan data yang diperoleh dari lapangan atau pengelola parkir.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan mean antara 2 kelompok yang berskala data interval. Model matematis dari metode analisis varians dapat digambarkan sebagai berikut

1. Uji satu arah

Uji dua arah ini digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya (positif ataupun negatif). Dengan sudah diketahuinya hipotesisnya maka uji ini tidak hanya untuk menguji adanya hubungan antara x dan y akan tetapi untuk membuktikan lebih jauh lagi hubungan x dan y itu positif maupun negatif.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

2. Uji dua arah

Uji dua arah ini digunakan untuk hipotesis yang belum diketahui arahnya (positif ataupun negatif). Dengan belum diketahuinya hubungan antara X dan Y maka uji dua arah ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara X dan Y.

$$H_0 : \mu_1 \geq \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

$$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

Hipotesis awal ditolak bila :

$|t \text{ hitung}| > t \text{ tabel}$ (terdapat perbedaan atau H_a)

Atau :

Hipotesis awal diterima bila :

$|t \text{ hitung}| \leq t \text{ tabel}$ (tidak terdapat perbedaan atau H_0)

Secara umum uji-T dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$t = \frac{\bar{X}_D - \mu_0}{SD \sqrt{n}}$$

$$\bar{X}_d = \frac{\sum D}{n}$$

$$S_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left\{ \sum D^2 - \frac{(\sum D)^2}{n} \right\}}$$

Keterangan :

D : Selisih antara X_1 dengan X_2 ($X_1 - X_2$)

n : Jumlah sampel

X bar : Rata-rata

Sd : Standar deviasi dari d

Keuntungan dari menggunakan data cross section adalah :

1. Mudah dalam penggunaan dan penerapannya.
2. Data yang digunakan tidak di-follow up sehingga biaya yang digunakan relatif lebih murah

Kelemahan dari penggunaan data cross section yaitu kurang tepat jika digunakan untuk menganalisis data kausal karena data kausal mengharuskan adanya sekuensi waktu.

3.2.2 Efektivitas

Untuk mengukur tingkat efektivitas digunakan rumus sebagai berikut (Insukindro dkk, 1994: 6):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Potensi Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Untuk mengukur nilai efektivitas, mengikuti standar yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri, maka dapat diketahui apabila koefisien efektivitasnya bernilai di bawah 0,40 (40 persen) berarti sangat tidak efektif, jika

berada pada nilai antara 40% – 60% berarti tidak efektif dan jika berada pada nilai 60% – 80% berarti cukup efektif, sedangkan jika berada di antara nilai 80% – 100% dikatakan efektif. (Tumimomor, 2002).

3.2.3 Efisiensi

Efisiensi bisa diukur dengan cara menghitung *Cost of Collection Efficiency Ratio* (CCER), yang merupakan perbandingan antara biaya operasional yang dikeluarkan dengan total penerimaannya. Rumus *Cost of Collection Efficiency Ratio* (CCER) sebagai berikut (Sidik, 1994: 65-67):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Efisiensi Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Semakin kecil rasionya, berarti biaya operasional yang dikeluarkan semakin kecil maka tingkat efisiensi semakin tinggi dalam pengelolaan pemungutannya.

3.2.4 Potensi Retribusi Parkir

Menghitung potensi retribusi parkir yang peneliti gunakan yaitu dengan menghitung uji beda 2 variabel atau *independent t-test* yang mana bila ada perbedaan dari 2 kelompok (pendapatan retribusi parkir berasal dari paguyuban petugas parkir Purbalingga dan Pemerintah daerah Purbalingga) dan perbedaan tersebut mengarah pada tingkat pendapatan retribusi parkir berasal dari paguyuban petugas parkir Purbalingga lebih tinggi maka ada potensi retribusi parkir yang belum di maksimalkan.

3.3 Pemilihan model penelitian

Pemilihan model yang akan digunakan dalam sebuah penelitian berdasarkan pertimbangan statistik merupakan hal yang perlu dilakukan, karena untuk memperoleh dugaan atau hipotesa yang efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu independent t-test untuk mengetahui perbedaan dari 2 sampel dengan subjek yang sama.

3.4 Definisi operasional

Sesuai yang dengan judul penelitian Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Daerah Kota Purbalingga Tahun 2018 Study Kasus Alun-alun Purbalingga, maka definisi operasional yang dapat dijelaskan yaitu :

1. Perbandingan

Dalam penelitian ini diartikan dengan membandingkan data pendapatan retribusi daerah kota alun-alun Purbalingga yang diterima oleh pemerintah daerah dengan retribusi parkir yang diterima oleh paguyuban petugas parkir Purbalingga.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah penggunaan waktu atau sumber daya dengan hemat untuk mewujudkan suatu rencana kegiatan. Dalam penelitian ini efisiensi yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengelola retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga.

3. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan jangka waktu yang telah

ditentukan. Dalam penelitian ini efektivitas yang dimaksud adalah tingkat efektivitas yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola retribusi parkir alun-alun Purbalingga.

4. Potensi

Potensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki yang sangat mampu untuk dikembangkan. Dalam penelitian ini potensi yang dimaksud adalah tingkat potensi pendapatan retribusi parkir alun-alun Purbalingga yang sudah/belum dimaksimalkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga.



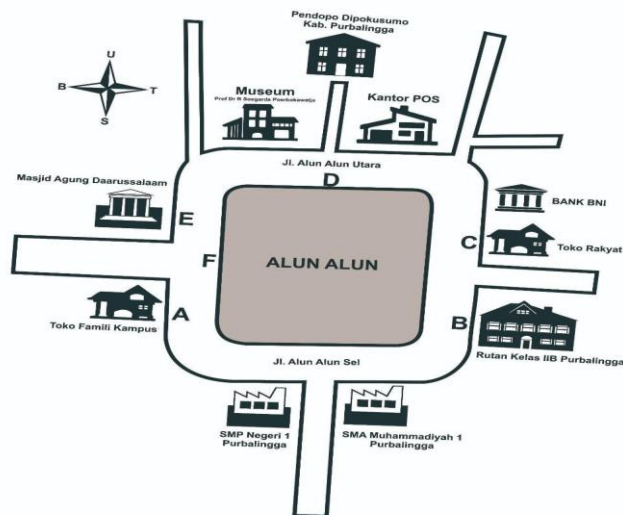
BAB IV

HASIL ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskripsi Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu data yang dihasilkan dan disajikan berbentuk angka. Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis menggunakan software SPSS dan menggunakan microsoft excel. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu efektivitas, efisiensi dan potensi retribusi parkir di kota Purbalingga khususnya daerah Alun-alun Purbalingga. Dengan tujuan tersebut, data yang digunakan berasal dari pemerintah dan paguyuban petugas parkir Purbalingga.

4.1 Gambaran Umum Peta Alun-alun Purbalingga



(sumber:peta buatan)

Pada Alun-alun Purbalingga, lahan parkir umum untuk mengunjungi Alun-alun Purbalingga dibagi menjadi 7 wilayah dan tidak semua wilayah bisa

menampung semua kendaraan bermotor, hanya beberapa wilayah yang bisa digunakan untuk parkir motor dan mobil yaitu:

1. Wilayah A

Seperti yang digambarkan pada peta di atas, wilayah A dapat digunakan untuk parkir motor dan mobil.

2. Wilayah B

Seperti yang digambarkan pada peta di atas, wilayah B hanya digunakan sebagai lahan parkir kendaraan roda 4.

3. Wilayah C

Seperti yang digambarkan pada peta di atas, wilayah C hanya digunakan sebagai lahan parkir kendaraan roda 4 (empat).

4. Wilayah D

Seperti yang digambarkan pada peta di atas, wilayah D hanya digunakan sebagai lahan parkir kendaraan roda 2 (dua).

5. Wilayah E

Seperti yang digambarkan pada peta di atas, wilayah E hanya digunakan sebagai lahan parkir kendaraan roda 4 (empat).

6. Wilayah F

Seperti yang digambarkan pada peta di atas, wilayah F hanya digunakan sebagai lahan parkir kendaraan roda 2 (dua).

4.2 Deskripsi Objek Penelitian

4.2.1 Potensi Retribusi Parkir Alun-alun Purbalingga

Potensi merupakan hal yang mendasar yang dapat diupayakan atau dimaksimalkan sumber dayanya. Potensi retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga yang dinilai cukup tinggi oleh pemerintah kabupaten Purbalingga menjadi sorotan sehingga pemerintah Purbalingga menargetkan retribusi parkir alun-alun Purbalingga sebesar Rp. 200.000.000 untuk tahun 2017 dan 2018¹. Adapun data-data yang dapat dikumpulkan dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan

Data yang diperoleh dari dinas perhubungan yaitu berupa data pemetaan wilayah lahan parkir di Kota Purbalingga di antaranya yaitu

- a. Alun-alun Purbalingga
- b. Jalan Jenderal Sudirman
- c. Purbalingga timur²
- d. Purbalingga utara
- e. Purbalingga selatan
- f. Purbalingga barat.

² Sumber data penerimaan pendapatan daerah purbalingga oleh dinas perhubungan

Data yang diperoleh dari dinas perhubungan kabupaten Purbalingga mengenai alun-alun Purbalingga sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pendapatan retribusi parkir pemerintah

Bulan	Tahun	
	2017	2018
Januari	Rp. 14.120.000	Rp. 14.322.000
Februari	Rp. 7.100.000	Rp. 9.134.000
Maret	Rp. 11.943.000	Rp. 11.716.000
April	Rp. 10.100.000	Rp. 11.572.000
Mei	Rp. 10.421.000	Rp. 9.100.000
Juni	Rp. 17.300.000	Rp. 19.120.000
Juli	Rp. 12.511.000	Rp. 15.853.000
Agustus	Rp. 15.863.000	Rp. 18.754.000
September	Rp. 12.000.000	Rp. 12.371.000
Oktober	Rp. 13.734.000	Rp. 12.139.000
November	Rp. 10.865.000	Rp. 12.127.000
Desember	Rp. 14.853.000	Rp. 15.239.000
Jumlah	Rp. 150.081.000	Rp. 161.447.000

(Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga)

Tabel 4.2 Pendapatan retribusi parkir pemerintah

Tahun	Biaya pemungutan retribusi parkir (Dinas Perhubungan)
2017	Rp. 146.000.000
2018	Rp.146.000.000

Sumber : data olahan Dinas Perhubungan

Seperti yang tertera pada Tabel 4.1 yaitu pendapatan retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp 150.081.000 dan Rp. 161.447.000, hal ini menunjukkan bahwa target yang harus dicapai pemerintah kabupaten Purbalingga tidak terpenuhi.

2. Paguyuban Petugas Parkir Purbalingga

Data yang diperoleh dari paguyuban petugas parkir Purbalingga adalah data khusus mengenai pendapatan retribusi parkir alun-alun Purbalingga. Berikut merupakan data yang diperoleh dari paguyuban petugas parkir kota Purbalingga:

Tabel 4.3 Pendapatan Retribusi Parkir Dari petugas Parkir

Bulan	Tahun	
	2017	2018
Januari	Rp. 15.338.000	Rp. 14.749.000
Februari	Rp. 9.650.000	Rp. 10.674.000
Maret	Rp. 12.203.000	Rp. 11.992.000
April	Rp. 10.653.000	Rp. 12.101.000
Mei	Rp. 11.920.000	Rp. 11.982.000
Juni	Rp. 18.570.000	Rp. 19.922.000
Juli	Rp. 13.921.000	Rp. 15.853.000
Agustus	Rp. 17.785.000	Rp. 18.084.000
September	Rp. 14.545.000	Rp. 14.921.000
Oktober	Rp. 18.900.000	Rp. 13.874.000
November	Rp. 11.842.000	Rp. 12.764.000
Desember	Rp. 17.460.000	Rp. 16.572.000
Jumlah	Rp. 172.787.000	Rp. 173.488.000

(Sumber: paguyuban petugas parkir purbalingga)

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 4.1 yaitu tentang pendapatan retribusi daerah alun-alun Purbalingga yang bersumber dari dinas perhubungan kabupaten Purbalingga dan dari Tabel 4.2 yang bersumber dari paguyuban petugas parkir kabupaten Purbalingga tidak sama.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1. Potensi Retribusi Parkir Alun-alun Purbalingga

Menguji potensi retribusi parkir alun-alun Purbalingga alat uji yang digunakan yaitu uji Independent Sample T-test, dengan kriteria uji sebagai berikut:

Jika $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima.

Jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, maka H_0 tidak diterima H_a diterima.

Keterangan :

1. H_0 : Adanya perbedaan yang signifikan antara pendapatan retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga yang diterima oleh pemerintah daerah dan paguyuban petugas parkir Purbalingga.
2. H_a : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga yang diterima oleh pemerintah daerah dan paguyuban petugas parkir Purbalingga.

a. Grup statistik

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif

Group Statistics					
	Instansi	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pendapatan Retribusi Parkir	Paguyuban	24	14428.	2939.597	600.043
	Petugas parkir		13		
	Dinas	24	13010.	3020.962	616.651
	Perhubungan		71		

Seperti yang tertera pada tabel 4.1 di atas, rata-rata pendapatan retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga tahun 2017 dan 2018 dari data yang diperoleh dari paguyuban petugas parkir Purbalingga yaitu sebesar Rp. 144.281.000 sedangkan dari data yang diperoleh dari dinas perhubungan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 130.107.000.

b. Independent Sample t-Test

Tabel 4.5 Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means		
		Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
Pendapatan Retribusi Parkir	Equal variances assumed	46	.010	1417.417
	Equal variances not assumed	45.966	.010	1417.417

Seperti yang tertera pada hasil uji statistik Independent T-test, tingkat sig. 2 tailed kurang dari 0.05 sehingga ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan retribusi parkir yang diterima dinas perhubungan kabupaten Purbalingga dengan paguyuban petugas parkir Purbalingga dan pada hipotesis yaitu menolak H0 dan menerima Ha.

c. Efektivitas Retribusi Parkir Alun-alun Purbalingga

Tingkat efektivitas retribusi parkir alun-alun Purbalingga yaitu dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Pendapatan Riil Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas 2017} &= \frac{150.081.000}{200.000.000} \times 100\% \\ &= 75,04\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas 2018} &= \frac{161.447.000}{200.000.000} \times 100\% \\ &= 80.73\% \end{aligned}$$

Tabel 4.6 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas	Keterangan
≤ 40%	Sangat Tidak Efektif
40% - 60%	Tidak Efektif
61% - 80%	Cukup Efektif
81% -100%	Efektif

(Tumimomor, 2002)

Dari hasil yang diperoleh di atas maka, pemerintah kabupaten Purbalingga sudah dinilai cukup efektif dalam mengelola retribusi parkir alun-alun daerah Purbalingga pada tahun 2017 dan 2018.

d. Efisiensi Retribusi Parkir Alun-alun Purbalingga

Tingkat efisien pendapatan retribusi parkir alun-alun Purbalingga dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2017} &= \frac{146.000.000}{150.081.000} \\ &= 97.28\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2018} &= \frac{146.000.000}{161.447.000} \\ &= 90,43 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.7 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi	Keterangan
$\leq 90\%$	Sangat Efisien
90% - 94,99%	Efisien
95% - 99%	Cukup Efisien
$\geq 100\%$	Tidak Efisien

Berdasarkan dari hasil perhitungan potensi di atas, maka potensi retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga tidak terserap secara maksimal, karena biaya pemungutan retribusi parkir terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan retribusi parkir yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten Purbalingga.

4.4 Analisis Ekonomi

4.4.1 Analisis Perbedaan Pendapatan Retribusi Parkir Pemerintah dan Petugas Parkir

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan secara statistik dan hasil dari data sekunder yang didapat menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara pendapatan retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga menurut paguyuban petugas parkir Purbalingga dengan pemerintah daerah kabupaten Purbalingga, hal ini ditunjukkan di mana Sig. (2 tailed) sebesar 0.010 atau lebih kecil dari 0.05%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan paguyuban petugas parkir daerah Purbalingga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten Purbalingga.

4.4.2 Efektivitas Retribusi Parkir Daerah Alun-alun Purbalingga

Efektivitas retribusi parkir di wilayah Alun-alun Purbalingga pada tahun 2017 menunjukkan sebesar 75.04% yang artinya tingkat efektivitasnya kurang 24.96% dari yang ditargetkan oleh pemerintah kabupaten Purbalingga untuk wilayah alun-alun Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi parkir untuk wilayah alun-alun Purbalingga dinilai cukup efektif. Besarnya target retribusi parkir untuk wilayah alun-alun Purbalingga pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 200.000.000 sementara realisasinya yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten Purbalingga yaitu sebesar Rp. 150.081.000 hal ini menunjukkan adanya kekurangan sebesar Rp. 49.919.000 dari yang pemerintah daerah kabupaten Purbalingga targetkan.

Pada tahun 2018, tingkat efektivitas sebesar 80.73% di mana tingkat efektivitasnya kurang 19.27% dari yang ditargetkan pemerintah kabupaten Purbalingga untuk wilayah alun-alun Purbalingga. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas retribusi parkir wilayah alun-alun Purbalingga dinilai cukup efektif dalam pelaksanaannya. Besarnya target retribusi parkir untuk wilayah alun-alun Purbalingga pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 200.000.000 di mana masih sama seperti pada tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya belum mencapai yang ditargetkan oleh pemerintah kabupaten purbalingga, sedangkan pada realisasinya yaitu sebesar Rp. 161.447.000, naik sebesar Rp. 11.366.000. Akan tetapi pada realisasinya belum memenuhi seperti yang ditargetkan dan ada kekurangan sebesar Rp. 38.553.000 dari yang pemerintah kabupaten Purbalingga targetkan.

Rata-rata efektivitas pendapatan retribusi parkir dari tahun 2017 hingga 2018 untuk wilayah alun-alun Purbalingga sebesar 77.88% yang berarti Dinas Perhubungan kabupaten Purbalingga sudah cukup efektif dalam mengelola retribusi parkir untuk wilayah alun-alun Purbalingga.

4.4.3 Efisiensi Retribusi Parkir Daerah Alun-alun Purbalingga

Tingkat efisiensi retribusi parkir wilayah alun-alun Purbalingga pada tahun 2017 menunjukkan pada angka 97.28% yang menunjukkan cukup efisien pada tabel rasio efisiensi. Dengan tingkat pendapatan sebesar Rp.150.081.000, pemerintah kabupaten Purbalingga mengeluarkan dana sebesar 97.28% untuk pemeliharaan dan pemungutan retribusi parkir wilayah alun-alun Purbalingga.

Sedangkan pada tahun 2018, tingkat efisiensi retribusi parkir menunjukkan pada angka 90.43% yang dinilai efisien jika mengacu pada tabel rasio efisiensi. Dengan pendapatan retribusi parkir wilayah alun-alun Purbalingga sebesar Rp. 161.447.000 pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan dana sebesar 90.43% dari pendapatan retribusi parkir untuk pemeliharaan dan pemungutan retribusi parkir wilayah alun-alun Purbalingga.

Rata-rata efisiensi retribusi parkir wilayah alun-alun Purbalingga pada tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar 93.85% yang berarti Dinas Perhubungan kabupaten Purbalingga dinilai sudah efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengolahan data dan hasil analisis ekonomi diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan tingkat pendapatan retribusi parkir alun-alun Purbalingga yang diterima oleh paguyuban petugas parkir Purbalingga dengan pendapatan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten Purbalingga.
2. Pemungutan pendapatan retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga dinilai cukup efektif untuk tahun 2017 dengan efektivitas sebesar 75.04% dan pada tahun 2018 sebesar 80.73%.
3. Tingkat efisiensi pendapatan retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga pada tahun 2017 sebesar 97.28% yang dinilai sudah cukup efisien dan pada tahun 2018 sebesar 90.43%.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaannya, pemerintah seharusnya lebih bisa mengawasi pendapatan retribusi parkir yang diterima oleh pemerintah dan pengelola lahan parkir tersebut agar tidak ada selisih yang cukup besar antara pendapatan retribusi parkir yang diterima oleh pemerintah daerah dan

petugas pengelola lahan parkir.

2. Dengan tingkat efisien yang dinilai hanya cukup efisien, pemerintah daerah seharusnya memaksimalkan potensi lahan yang dijadikan tempat parkir di daerah alun-alun Purbalingga agar biaya pemungutan dan pemeliharaan lahan parkir sebanding dengan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah Purbalingga.
3. Pemerintah daerah Purbalingga seharusnya bisa mengelola lahan parkir di daerah perkotaan Purbalingga dan tidak melelang lahan parkir yang dinilai memiliki potensi pendapatan retribusi parkir yang tinggi agar bisa lebih memaksimalkan pendapatan retribusi parkir.



DAFTAR PUSTAKA

- Pradana, A. Yulianti, A. dan Setijowarno, D. (2014), *Potensi Pendapatan Parkir di Kota Salatiga*.
- Timisela, S. Asnawi, M. dan Hafizriamda, R. (2014), *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura*, *Jurnal Keuda Vol. 2 No. 1*.
- Gujarati, D. dan Porter, D. (2013), *Dasar-dasar Ekonometrika*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sriyana, Jaka. (2014), *Metode Regresi Data Panel*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Heru. (2008), “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, studi kasus pada pemerintahan kota Yogyakarta tahun 2003-2006*”, Program Sarjana, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Hidayat, Anwar (2017), *Tutorial Independent t-test dengan SPSS*, dari <https://www.statistikian.com/2014/04/independen-t-test-dengan-spss.html/amp>
- Muthmainah (2015), *Pengertian Otonomi Daerah Lengkap Dengan Prinsip dan Contohnya*, dari <https://thegorbalsla.com/otonomi-daerah/>
- admin (2015), *Pengertian dan Sumber-sumber Penerimaan Daerah* dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/sumber-sumber-penerimaan-daerah.html>.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

<http://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/pengelolaan-retribusi-parkir-di-tepi-jalan-umum-sebagai-upaya-peningkatan-pendapatan-asli-daerah.html>.

<https://www.statistikian.com/2014/04/independen-t-test-dengan-spss.html/amp>

https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_varians.

